BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Myanmar (Republic of Myanmar) yang dulunya bernama *Union of Myanmar* merupakan salah satu negara berkembang yang berada di kawasan Asia Tenggara yang menjalankan pemerintahannya dibawah kekuasaan militer. Kudeta militer pertama kali dilakukan oleh Jenderal Ne Win pada tanggal 2 Maret 1962[1]. Hal itulah yang menjadi awal mula pemerintahan militer terlaksana. Kudeta militer itu terjadi disaat pemerintahan militer Dewan Revolusi Persatuan yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win berhasil menggantikan pemerintahan sipil *The Anti-Fascist People's Freedom League* (AFPFL) yang dipimpin oleh Perdana Menteri U Nu[2]. Kemunculan kekuatan militer dalam sistem pemerintahan dan politik Myanmar telah menggantikan pelaksanaan sistem demokrasi parlementer yang telah diterapkan di Myanmar sebelum dan sesudah kemerdekaannya dari Inggris.

Peralihan kekuasaan melalui kudeta militer ini bukanlah kali pertama bagi Myanmar, namun sudah terjadi beberapa kali dalam sejarah mulai dari tahun 1962, 1988, hingga 2021. Masa kepemimpinan militer dibagi menjadi dua periode. Periode pertama terjadi pada tahun 1962-1974 dan periode kedua

---

[1] Rizbar Bara Ryamizard, Kudeta Militer Myanmar, diakses dalam https://www.ircorner.com/kudeta-militer-myanmar/ (03/04/2023, 01.03 WIB)

[2] Benedikta Miranti, *Bukan Pertama Kali, Kudeta Militer Besar Pernah Terjadi di Myanmar pada 1962*, diakses dalam https://www.liputan6.com/global/read/4471882/bukan-pertama-kali-kudeta-militer-besar-pernah-terjadi-di-myanmar-pada-1962 (03/04/2023, 01.11 WIB)

terjadi pada 1974-1988[3]. Kudeta militer periode kedua terjadi pada tahun 1988 dibawah pemerintahan Saw Muang dimana Saw Maung sudah mengumpulkan kekuatan untuk membentuk *State Law and Order Restoration Council* (SLORC).

Gerakan protes oleh masyarakat Myanmar terus dilakukan di sepanjang tahun 1988, dan puncak dari peristiwa demonstrasi ini terjadi pada tanggal 8 Agustus 1988 dan dikenal dengan sebutan "Pemberontakan 8888" atau "8888 Uprising". Dengan tujuan untuk menghapus kekuasaan militer yang menempati pemerintahan Myanmar saat itu dan menuntut adanya demokrasi di Myanmar. Selama demonstrasi tersebut berlangsung di tahun 1988, tercatat sebanyak 3 ribu hingga 10 ribu demonstran menjadi korban jiwa yang diakibatkan dari tindakan militer Myanmar yang ingin mengakhiri gerakan protes tersebut[4]. Dari gerakan demonstrasi diatas juga menjadi cikal bakal dari terbentuknya partai *National League Democracy* atau disebut sebagai partai NLD di Myanmar yang diketuai oleh Aung San Suu Kyi.

Tahun 2011 merupakan tahun dimana proses transisi demokrasi di Myanmar mulai terjadi. Pada tahun tersebut, pemerintahan negara Myanmar memutuskan untuk mengubah pemerintahannya yang sebelumnya merupakan pemerintahan junta militer kembali menjadi pemerintahan sipil. Saat itu juga, pemerintahan Myanmar juga mengumumkan presiden baru bernama Thein

[3] Konsam Shakila Devi, *Myanmar under the military rule 1962-1988*. International Research Journal of Social Sciences Vol, 3, No, 10, (2014), hal. 46.
[4] Eli Meixler, *How a Failed Democracy Uprising Set the Stage for Myanmar's Future*, diakses dalam https://time.com/5360637/myanmar-8888-uprising-30-anniversary-democracy/ (03/04/2023, 01.24 WIB)

Sein yang merupakan mantan perdama menteri Myanmar yang berasal dari militer[5].

Selama berpuluhan tahun itulah juga banyak aksi demokrasi yang turut tumbuh dan mewarnai sejarah perpolitikan di Myanmar. Gerakan pro demokrasi yang dilakukan masyarakat di Myanmar memiliki peran yang cukup besar dalam perjalanan terkait dengan proses demokratisasi yang sedang terjadi di Myanmar. Banyaknya dari gerakan politik maupun gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pro demokrasi di Myanmar terhadap rezim pemerintahan militer Myanmar yang otoriter menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat Myanmar ingin adanya demokrasi di negaranya. Terdapat beberapa peristiwa yang terjadi dalam politik Myanmar yang diantaranya merupakan usaha yang dilakukan oleh gerakan pro demokrasi di Myanmar untuk mengupayakan terjadinya demokratisasi di Myanmar dan menjadikan negara Myanmar menjadi negara demokrasi.

Partai NLD atau partai Liga Demokrasi Nasional yang selalu memenangkan suara terbanyak di setiap pemilu yang diselenggarakan di Myanmar memperlihatkan bahwa masyarakat di Myanmar menginginkan terjadinya demokrasi di negaranya. Aung San Suu Kyi dan rekan-rekannya dari Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkan pemilu tahun 2020, yang berujung pada kudeta berikutnya. Dimana kudeta ini muncul pada tanggal 1 Februari 2021 yang menjadi kudeta militer ketiga di Myanmar. Pihak militer

[5] Oliver Holmes, *Final Myanmar results show Aung San Suu Kyi's party won 77% of seats*, diakses dalam https://www.theguardian.com/world/2015/nov/23/final-myanmar-results-show-aung-san-suu-kyis-party-won-77-of-seats (03/04/2023, 01.25 WIB)

yang mendukung oposisi menganggap bahwa hasilnya tidak sah dan menegaskan bahwa telah terjadi penipuan yang meluas sehingga kemudian mereka melakukan kudeta. Sedangkan hal tersebut dibantah oleh Komisi Pemilihan Umum Myanmar[6].

Tatmadaw yang merupakan angkatan militer bersenjata Myanmar melakukan kudeta sebagai usaha mengembalikan otoritas militer penuh melalui *State Administration Council* (SAC), kurang dari tiga bulan setelah NLD memenangkan pemilu November 2020 dengan kemenangan gemilang. Tatmadaw menindas gerakan pro demokrasi yang tumbuh dengan keras di minggu-minggu berikutnya, yang pada akhirnya menyebabkan tuntutan gerakan tersebut berubah dari pemulihan status quo pra-kudeta menjadi pengusiran total Tatmadaw dari kancah politik Myanmar. Pada saat Suu Kyi dipenjara, Suu Kyi menulis pesan sebagai antisipasi kudeta yang kemudian dipublikasikan. Suu Kyi memohon kepada rakyat Myanmar melalui suratnya untuk mencegah terjadinya kudeta. Suu Kyi menuntut agar orang melakukan pembangkangan sipil. Suu Kyi telah menggunakan taktik ini dalam pertempurannya dengan rezim junta militer di masa lalu.

Maka terbentuklah CDM, *Civil Disobedience Movement* terbentuk pada 3 Februari 2021 dimulai bersamaan dengan demonstrasi yang meluas yang dipimpin oleh pegawai pemerintah, termasuk profesional medis, perawat,

[6] Alice Cuddy, *Myanmar coup: What is happening and why?*, diakses dalam https://www.bbc.com/news/world-asia-55902070 (03/04/2023, 01.26 WIB)

pendidik, pekerja transportasi, dan birokrat dari berbagai industri[7]. Serikat pekerja, organisasi layanan publik, sejumlah bintang musik dan film, serta kelompok minoritas dan LGBT+ dengan cepat bergabung untuk mendukung gerakan ini. Mereka mengadvokasi pemulihan pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi selain mendukung perjuangan tanpa kekerasan pemenang Nobel Perdamaian tersebut.

CDM awalnya merupakan tindakan pemberontakan yang tidak direncanakan, terutama dengan kedok pemogokan. Sektor sipil secara bertahap beralih dari mempekerjakan pasukan militer menjadi warga sipil sejak 2011, yang memungkinkan CDM tumbuh ke proporsi yang sebelumnya tidak terpikirkan. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang terbentuk antara gerakan-gerakan pro demokrasi di Myanmar seperti *National Unity Government* (NUG), *Milk Tea Alliance*, dan Kelompok Etnis Minoritas. Setelah kudeta, Moe Sandar Myint sebagai sosok pemimpin perempuan yang berasal dari serikat pekerja garmen memimpin protes pertama yang diikuti banyak pekerja dalam empat hari. Gambar Suu Kyi ditampilkan di sejumlah poster protes anti-kudeta saat itu[8].

CDM di Myanmar mencapai tujuannya melalui berbagai taktik, termasuk protes jalanan, pemanfaatan media sosial, kreativitas dalam aksi, dukungan internasional, tekanan ekonomi dan politik, serta ketekunan dalam perlawanan.

---

[7] The Irrawaddy, *The Long History of Myanmar's Civil Disobedience Movement*, diakses dalam https://www.irrawaddy.com/news/burma/long-history-myanmars-civil-disobedience-movement.html (01/10/2023, 20.40 WIB)

[8] Jonathan Head, *Myanmar: Mengapa pemrotes anti-kudeta militer kini memilih jalan kekerasan?*, diakses dalam https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60196894 (22/06/2023, 15.11 WIB)

Strategi ini bersama-sama membantu mereka dalam mengakhiri pemerintahan militer, memulihkan demokrasi, dan memastikan hak asasi manusia di Myanmar. Gerakan ini mencerminkan kekuatan perubahan sosial yang dapat dicapai dengan berbagai cara yang terorganisir dan kreatif.

Hingga tahun 2022, Myanmar masih mengalami peperangan dan krisis politik. Menurut sebuah studi oleh organisasi pengawas hak asasi manusia Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (Assistance Association for Political Prisoners/AAPP), sejak kudeta, junta telah membunuh sedikitnya 2.900 orang dan menahan 17.500 lainnya. Selain itu, pada tahun 2022, sekitar 40% populasi akan hidup dalam kemiskinan. Tidak banyak bantuan dari komunitas internasional selama keadaan ini. Junta didesak oleh dunia internasional untuk menghentikan pertumpahan darah dan memulai pembicaraan dengan kelompok politik di Myanmar. Tapi mereka kekurangan pengetahuan. Ekonomi Myanmar sementara itu dalam keadaan lumpuh. Makanan, bensin, dan kebutuhan lainnya juga terbatas. Selain itu, junta dilaporkan kesulitan meminta bantuan dari luar untuk membalikkan keadaan. Disamping itu juga, ada sanksi internasional yang membebani Myanmar[9].

Penulis tertarik untuk mengangkat isu peralihan sistem pemerintahan yang melibatkan gerakan pro demokrasi ini ke dalam sebuah skripsi dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Upaya *Civil Disobedience Movement* dalam Demokratisasi di Myanmar Pasca Kudeta Tahun 2021-2022.

[9] Isa, *2 Tahun Junta Militer Berkuasa, Bagaimana Kondisi Myanmar Sekarang?*, diakses dalam https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230201135630-106-907594/2-tahun-junta-militer-berkuasa-bagaimana-kondisi-myanmar-sekarang (23/06/2023, 00.22 WIB)

Hal ini disebabkan adanya perubahan atau penggantian sistem pemerintahan di Myanmar dari yang sebelumnya otoriter menjadi sistem demokrasi serta upaya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dibantu dengan adanya *Civil Disobedience Movement* di dalamnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut.

Bagaimana Upaya *Civil Disobedience Movement* dalam Demokratisasi di Myanmar Pasca Kudeta Tahun 2021-2022?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka dapat penulis uraikan tujuan penelitian berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai demokratisasi di Myanmar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai upaya *Civil Disobedience Movement* dalam demokratisasi pasca kudeta tahun 2021-2022 di Myanmar.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai perkembangan ilmu hubungan internasional terlebih yang berhubungan dengan kudeta militer, demokratisasi, dan gerakan sosial di Myanmar.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat menjadi bahan acuan mengenai bagaimana upaya Civil Disobedience Movement dalam demokratisasi yang terjadi di Myanmar.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam menganalisis penelitian ini penulis membutuhkan penelitian terdahulu (literature review) sebagai bahan pertimbangan untuk mencari tahu perbandingan yang menunjukkan perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada atau pernah dilakukan sebelumnya.

Adapun penelitian yang menjadi perbandingan (literature review) dalam penelitian ini adalah pertama, penelitian yang berjudul **"Perkembangan Demokrasi Myanmar Pasca Pemerintahan Junta Militer."** oleh Assazali Sibawaihi pada tahun 2014. Penelitian ini menjelaskan mengenai perkembangan transisi demokrasi Myanmar pada tahun 2008-2012 setelah sebelumnya menggunakan sistem pemerintahan junta militer menjadi demokrasi. Studi ini menggunakan berbagai gagasan, termasuk demokrasi, demokratisasi, kudeta militer, pretorianisme, dan interaksi sipil-militer, untuk mengkaji politik di bawah sistem pemerintahan junta militer, transisi ke sistem pemerintahan demokratis, dan kebangkitan serta peran Aung San Suu Kyi.

Dimana hal ini berawal pada tahun 1962, setelah kudeta Jenderal Ne Win yang menggulingkan pemerintahan Sao Shwe Taik, Myanmar atau yang sebelumnya dikenal Burma berada di bawah kekuasaan Junta Militer. Sejak saat itu, pemerintahan militer yang menerapkan bentuk pemerintahan yang

otoriter bertanggung jawab atas kepemimpinan nasional Myanmar. Kemudian pada 2004, Myanmar mengatakan akan memulai "peta jalan menuju demokrasi" yang diumumkan oleh Win Aung, menteri luar negeri saat itu, pada konferensi internasional di Bangkok yang dikenal sebagai "Bangkok Process".

Aung San Suu Kyi memperoleh kursi di parlemen di tengah perubahan politik yang terjadi di Myanmar, yakni pemilihan umum yang diadakan pada April 2013. Pada tahun 2014, Myanmar juga mengambil alih kepemimpinan resmi ASEAN. Presiden Thein Sein menjadikan "Bergerak maju dalam persatuan di sebuah komunitas makmur dan damai" sebagai pokok bahasa selama kepemimpinannya di ASEAN[10].

Penelitian terdahulu yang kedua merupakan penelitian yang berjudul **"Arus Balik Arab Spring: Kegagalan Demokratisasi Mesir (Studi pada Penggulingan Pemerintahan Muhammad Mursi oleh Kudeta Militer)"** oleh Muhammad Hasan Ode Mantra pada tahun 2015. Dengan menggunakan konsep kudeta, pretorianisme, dan teori Huntington, Muhammad Hasan Ode Mantra menyampaikan bahwa demokrasi Mesir yang sedang dalam masa transisi mengalami kemunduran akibat kudeta militer terhadap presiden Mohamed Mursi yang terpilih secara demokratis. Sisa-sisa rezim Mubarok yang dekat dengan militer juga dibedakan dengan pencopotan dan pemecatan pejabat dan upaya untuk melembagakan politik pemerintahan Mursi dipandang berbahaya bagi militer. Akibatnya memperburuk hubungan antara masyarakat

[10] Assazali Sibawaihi, 2014, *Prospek Perkembangan Demokrasi Myanmar Pasca Junta Militer*, Thesis, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

dan militer. Militer kemudian memprotes karena komposisi pemerintah cenderung berada di bawah pengawasan IM (Ikhwanisasi Negara), dan karena dekrit yang dikeluarkan Mursi untuk mengadili Hosni Mubarak dan sekutunya menjadi faktor penyebab kudeta.

Mesir kembali menjadi negara otoriter disebabkan oleh hubungan yang kurang baik antara pemerintah Mursi dan militer, pasca kudeta dan intervensi militer yang ditandai dengan naiknya Alsisi, presiden berlatar belakang militer, dan instabilitas politik pasca kudeta yang ditandai dengan pelanggaran HAM seperti pencopotan dan penangkapan tokoh-tokoh IM. Jenis dominasi militer yang signifikan atas politik sipil ditunjukkan dengan terpilihnya Alsisi sebagai presiden dengan sedikit keterlibatan politik dalam pemilu. Fakta bahwa demokrasi Mesir masih dalam keadaan transisi memungkinkan pretorianisme militer untuk merebut kembali kekuasaan[11].

Penelitian terdahulu yang ketiga merupakan penelitian yang berjudul **"Dinamika Hubungan Sipil-Militer di Mesir: Dari Era Hosni Mubarak hingga Abdel Fattah El-Sisi"** oleh Debby Aurellia pada tahun 2021. Dengan menggunakan konsep demokratisasi, hubungan sipil-militer dan pretorianisme dengan teori Huntington, Debby menjelaskan bahwa El-Sisi dan oligarki yang berkembang di dalam militer. Di Mesir, hubungan sipil-militer adalah jenis oligarki militer di bawah pemerintahan Hosni Mubarak, jenis oligarki militer di bawah pemerintahan transisi SCAF, dan jenis koalisi sipil-militer di bawah

[11] Muhammad Hasan Ode Mantra, 2015, *Arus Balik Arab Spring: Kegagalan Demokratisasi Mesir (Studi Pada Penggulingan Pemerintahan Muhammad Mursi Oleh Kudeta Militer),* Thesis, Malang : Jurusan Hubungan Internasional, University of Muhammadiyah Malang.

kepresidenan Mohammed Mursi sebagai presiden yang terpilih secara demokratis. Oligarki militer dibangun sebagai El-Sisi dan pola[12].

Penelitian terdahulu yang keempat merupakan penelitian yang berjudul **"Legitimasi Kudeta Oleh Militer Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional"** oleh Imanuddin Imran pada tahun 2022. Dengan menggunakan konsep *discipline democracy*, Imanuddin menjelaskan bahwa atas dasar tuduhan kecurangan pemilu, militer membenarkan mengambil kendali. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi memenangkan pemilu 2020. Untuk menuntut agar militer mengakui hasil pemilu, jutaan orang berdemonstrasi secara nasional. Demonstran dengan keras dan tegas mengutuk junta militer dan menuntut agar demokrasi mereka yang telah dicuri, dipulihkan. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak dapat mencapai kesepakatan tentang pernyataan bersatu yang mengecam dan mengancam sanksi terhadap kudeta militer di Myanmar. Permintaan junta militer Myanmar untuk menahan diri sepenuhnya termasuk dalam draf pernyataan DK. Dewan Keamanan PBB siap mengambil tindakan jika situasi di Myanmar tidak membaik menurut draf pernyataan tersebut[13].

Penelitian terdahulu yang kelima merupakan penelitian yang berjudul **"Implikasi Konflik Kudeta Militer Myanmar terhadap Sanksi Internasional"** oleh Riady Ibnu Khaldun pada tahun 2021. Dengan

---

[12] Debby Aurellia, 2021, *Dinamika Hubungan Sipil-Militer di Mesir: Dari Era Hosni Mubarak Hingga Abdel Fattah El-Sisi*, Thesis, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

[13] Imanuddin Imran, 2022, *Legitimasi Kudeta Oleh Militer Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional*, Skripsi, Makassar : Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

menggunakan perspektif kebijakan luar negeri dan sanksi internasional, Riady menjelaskan bahwa penggunaan sanksi merupakan cara yang digunakan oleh suatu negara terhadap negara asing dalam upaya memajukan kepentingan nasionalnya sendiri dan menanggapi isu-isu domestik yang dianggap melanggar hukum internasional. Untuk memberikan pengaruh besar pada penerima sanksi, negara yang mengatur sanksi seringkali berasal dari negara yang kepemilikan kekuasaannya lebih besar. Negara yang terkena sanksi akan mematuhi tuntutan yang dibuat setelah sanksi diberlakukan. Mirip dengan apa yang terjadi di Myanmar, kerusuhan internal di negara tersebut menyusul upaya kudeta militer terhadap pemerintah yang sah. Akibat isu tersebut, sejumlah negara menerapkan berbagai bentuk sanksi terhadap Myanmar dalam upaya meredam isu dan memperbaiki situasi terkait konflik[14].

Penelitian terdahulu yang keenam merupakan penelitian yang berjudul **"Krisis Legitimasi Terhadap Pemerintahan Junta Militer di Myanmar "** oleh Hanifahturahmi, Ahmad Saudi, A'ang Chaarnaillan pada tahun 2022. Dijelaskan bahwa Kudeta tersebut bahkan menimbulkan sejumlah tanggapan positif dari masyarakat Myanmar maupun masyarakat internasional karena pemerintahan junta militer saat itu memilih kebijakan yang mengutamakan memerangi siapa saja yang menentang kekuasaannya, tanpa menghiraukan pentingnya dukungan rakyat dan pengakuan. Karena mengakibatkan berbagai kejahatan, hilangnya nyawa, dan pembatasan hak-hak sipil rakyat Myanmar,

[14] Riady Ibnu Khaldun, *Implikasi Konflik Kudeta Militer Myanmar terhadap Sanksi Internasional*, IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies, Vol, 3 No, 1, hal 14-22.

tindakan ini dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Tanggapan masyarakat internasional terhadap sejarah kekejaman hak asasi manusia tidak serta merta menyelesaikan masalah ini dan di beberapa negara, seperti Myanmar, dapat memperburuknya secara signifikan[15].

Penelitian terdahulu yang ketujuh merupakan penelitian yang berjudul **"Analisis Kudeta Militer Myanmar Terhadap Pemerintahan Sipil Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional"** oleh Kadek Putra Yasa pada tahun 2022. Dijelaskan bahwa sejak kudeta tahun 1962 yang menjungkirbalikkan sistem demokrasi yang telah berlaku sejak kemerdekaan negara itu, militer telah menguasai Myanmar. Mengontrol kekuatan penuh militer seringkali menghasilkan keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat umum. Militer di Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil sebagai urusan domestik sepenuhnya. Militer seharusnya berfungsi sebagai alat negara untuk menjaga keamanan, namun militer Myanmar terus-menerus ikut campur dalam menjalankan negara. Sejak tahun 1962 hingga saat ini, militer Myanmar secara rutin melakukan aksi kudeta sebagai akibat dari pasang surut demokrasi yang terjadi. Kudeta yang berlangsung lama kini menjadi topik yang mendapat perhatian dalam skala global. Kudeta tersebut mengungkapkan kurangnya kesiapan militer untuk menyerahkan sepenuhnya kekuasaan kepada warga sipil. Pada akhirnya, efek kudeta menyebabkan banyak pihak dalam dan luar negeri mengkritik kegiatan

[15] Hanifahturahmi, Ahmad Saudi, A'ang Chaarnaillan, *Krisis Legitimasi Terhadap Pemerintahan Junta Militer di Myanmar*, Jurnal Trias Politika, Vol, 6, No, 1, hal. 57 – 69.

militer Myanmar dan membuat hambatan terhadap standar hukum internasional, yang dituangkan dalam Piagam PBB dan Piagam ASEAN dan mewajibkan semua pihak untuk menjunjung tinggi prinsip non-intervensi[16].

Penelitian terdahulu yang kedelapan merupakan penelitian yang berjudul **"Media Baru, Pemuda dan Gerakan Sosial di Mesir; Kajian terhadap Gerakan Pemuda 6 April"** oleh Fatkhur Roji, S.Hum pada tahun 2018. Dengan menggunakan teori gerakan sosial baru dengan pendekatan sejarah, Fatkhur menjelaskan bahwa ada banyak gerakan kelompok yang melawan rezim Hosni Mubarok, salah satunya adalah Gerakan Pemuda 6 April yang dibentuk pada tahun 2008. Pada awalnya, gerakan ini berjalan seperti gerakan perlawanan pada umumnya namun lambat laun gerakan ini menjadi gerakan yang bersifat multidimensional dikarenakan tema yang diusung mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan hukum. Mereka memanfaatkan media sosial sebagai ajang untuk mengkritisi permasalahan-permasalahan yang melanda Mesir. Dengan gagasan dan idealismenya, gerakan ini dapat memberikan aksi-aksi narasi besar sebagai konsumsi publik yang pada puncaknya dapat membuat runtuh rezim Hosni Mubarok[17].

Penelitian terdahulu yang kesembilan merupakan penelitian yang berjudul **"Model Of The Civil Society Movement Post-Military Coup Myanmar"** oleh Raceluin Armadela Hemas Karinda dan Najamuddin Khairur

---

[16] Kadek Putra Yasa, 2022, Analisis *Kudeta Militer Myanmar Terhadap Pemerintahan Sipil Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol, 2 No, 2, hal. 103-110.
[17] Fatkhur Roji, 2018, *Media Baru, Pemuda dan Gerakan Sosial di Mesir; Kajian terhadap Gerakan Pemuda 6 April*, Thesis, Yogyakarta : Jurusan Interdiscplinary International Studies Konsentrasi Kajian Timur Tengah, Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rijal pada tahun 2023. Dijelaskan bahwa sejarah politik Myanmar ditandai dengan perjuangan melawan kekuasaan militer dan kudeta. Kudeta tahun 1962 menggantikan demokrasi dengan kekuasaan militer selama 26 tahun. Militer juga menolak hasil pemilu tahun 1990 namun menghadapi tentangan ketika Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menang pada tahun 2015 dan 2020. Kemenangan pemilu tahun 2020 menimbulkan tuntutan hukum dari pihak militer sehingga mengakibatkan kudeta pada tanggal 1 Februari 2021.

Kudeta tersebut memicu protes yang meluas, dengan jutaan warga sipil, termasuk anggota *Civil Disobedience Movement* (CDM), berdemonstrasi menentang pemerintahan militer. Militer menanggapinya dengan tindakan keras yang brutal, yang melibatkan pembunuhan massal, penyiksaan, dan penangkapan. *People's Defense Force* (PDF) muncul sebagai kelompok perlawanan bersenjata pada tahun 2021, berbeda dengan gerakan sebelumnya.

Militer menerapkan strategi "Empat Pemotongan" untuk membatasi akses terhadap makanan, dana, intelijen, dan perekrutan, yang bertujuan untuk melemahkan dukungan terhadap perlawanan. Serangan udara dan kekerasan menargetkan berbagai wilayah, sehingga menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan. Pasukan keamanan menewaskan lebih dari 10.000 orang dan ribuan orang ditangkap. Meskipun terjadi penindasan, perlawanan tetap ada, dan *National Unity Government* (NUG) dibentuk untuk menggulingkan kediktatoran militer dan memulihkan demokrasi. PDF memainkan peran penting dalam upaya ini.

Studi ini mengeksplorasi Gerakan Masyarakat Sipil pasca kudeta militer, dengan menekankan aspek unik yang diperkenalkan oleh PDF. Hal ini mencakup evolusi gerakan dalam menanggapi kudeta, peran media sosial, dan tantangan yang dihadapi para aktivis yang memperjuangkan demokrasi di Myanmar. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai dinamika gerakan masyarakat sipil Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021[18].

Penelitian terdahulu yang terakhir merupakan penelitian yang berjudul **"Arab Spring: Islam dalam gerakan sosial dan demokrasi Timur Tengah"** oleh Shafira Elnanda Yasmine pada tahun 2015. Dijelaskan bahwa peristiwa tragis di Tunisia ada seorang pedagang buah bernama Mohamed Bouazizi yang membakar diri di depan Kantor Dewan Regional Sidi Bouzid memicu gelombang besar demonstrasi yang mengguncang Timur Tengah. Peristiwa ini menjadi titik awal dari apa yang dikenal sebagai Arab Spring, sebuah gerakan demokrasi yang membawa tuntutan perubahan besar terhadap rezim-rezim yang telah lama memerintah dan dianggap korup.

Berbulan-bulan berlalu, dengan demonstran yang terus menuntut perubahan di berbagai negara. Gerakan ini tidaklah homogen; di dalamnya terdapat kelompok-kelompok dengan ideologi yang beragam. Di satu sisi, terdapat kelompok liberal sekuler yang mendambakan demokrasi, sedangkan di sisi lain, kelompok-kelompok Islam juga turut ambil bagian,

[18] Raceluin Armadela Hemas Karinda and Najamuddin Khairur Rijal., *Model Of The Civil Society Movement Post-Military Coup Myanmar*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol, 4, No, 2 (Juni 2023), hal. 109 – 120.

menggabungkan nilai-nilai keagamaan dalam gerakan sosial mereka. Protes dan kerusuhan merambat cepat, menyebar ke hampir seluruh negara Arab. Demonstran, yang berasal dari berbagai latar belakang ideologis, bersatu untuk menyuarakan keprihatinan atas situasi di dunia Arab sendiri. Solidaritas tidak lagi terfokus pada musuh eksternal seperti Israel atau Amerika Serikat, tetapi menjadi panggilan untuk perubahan internal.

Nilai-nilai agama, ritual, dan praktik-praktik kepercayaan memainkan peran sentral dalam dinamika gerakan sosial ini. Meskipun ada ketidakpastian dan keraguan dari kelompok Barat mengenai kompatibilitas Islam dengan demokrasi, gerakan ini tetap mencerminkan keragaman dan kompleksitas hubungan antara agama dan politik di Timur Tengah. Meskipun Arab Spring membawa perubahan signifikan dengan jatuhnya beberapa pemerintahan autokratis, tidak datang tanpa konsekuensi. Ribuan demonstran tewas dalam perjuangan mereka untuk demokrasi, dan proses ini terus menantang persepsi Barat terhadap Timur Tengah. Dalam konteks ini, karya ilmiah ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai peran agama dalam protes di Arab dan bagaimana gerakan sosial ini merespons tantangan terhadap kompatibilitas Islam dengan demokrasi[19].

[19] Shafira Elnanda Yasmine, *Arab Spring: Islam dalam gerakan sosial dan demokrasi Timur Tengah.* Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol, 28, No, 2, (2015), hal. 106-113

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No	Judul Penelitian	Penulis	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Perkembangan Demokrasi Myanmar Pasca Pemerintahan Junta Militer	Assazali Sibawaihi	Kualitatif deskriptif, Konsep demokrasi, demokratisasi, kudeta militer dan pretorianisme, serta hubungan sipil-militer.	Perkembangan transisi demokrasi Myanmar pada tahun 2008-2012 setelah sebelumnya menggunakan sistem pemerintahan junta militer menjadi demokrasi. Studi ini berkaitan dengan politik selama kediktatoran militer, peralihan ke demokrasi, dan kebangkitan serta signifikansi Aung San Su Kyi.
2.	Arus Balik Arab Spring: Kegagalan Demokratisasi Mesir (Studi pada Penggulingan Pemerintahan Muhammad Mursi oleh Kudeta Militer	Muhammad Hasan Ode Mantra	Kualitatif deskriptif, Konsep kudeta, pretorianisme, dan teori Huntington.	Bagi demokrasi Mesir yang saat ini berada dalam tahap transisi, Mohammed Mursi merupakan sebuah kemunduran. Sisa-sisa rezim Mubarok yang dekat dengan benteng militer juga dibedakan dengan pencopotan dan pemecatan pejabat, dan upaya melembagakan politik pemerintahan Mursi dipandang merugikan militer. Akibatnya, terjadi gejolak antara

No	Judul Penelitian	Penulis	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
				masyarakat dan militer.
3.	Dinamika Hubungan Sipil-Militer di Mesir: Dari Era Hosni Mubarak hingga Abdel Fattah El-Sisi	Debby Aurellia	Kualitatif deskriptif, Konsep demokratisasi, hubungan sipil-militer dan pretorianisme dengan teori Huntington.	Mesir pada kepemimpinan Hosni Mubarak bertipe oligarki militer, SCAF bertipe oligarki militer selama pemerintahan transisi, namun kepresidenan Muhammad Mursi sebagai presiden yang terpilih secara demokratis melihat pembentukan koalisi militer sipil. Oligarki militer dibangun sebagai sisi dan pola.
4.	Legitimasi Kudeta Oleh Militer Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional	Imanuddin Imran	Kualitatif deksriptif, Konsep *discipline democracy*,	Atas dasar tuduhan kecurangan pemilu, militer membenarkan mengambil kendali. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi memenangkan pemilu 2020. Untuk menuntut agar militer mengakui hasil pemilu, jutaan orang berdemonstrasi secara nasional.
5.	Implikasi Konflik Kudeta Militer Myanmar terhadap	Riady Ibnu Khaldun	Kualitatif deskriptif, Perspektif kebijakan luar negeri dan	Penggunaan sanksi merupakan cara yang digunakan oleh suatu negara terhadap negara asing dalam

No	Judul Penelitian	Penulis	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	Sanksi Internasional		sanksi internasional.	upaya memajukan kepentingan nasionalnya sendiri dan menanggapi isu-isu domestik yang dianggap melanggar hukum internasional.
6.	Krisis Legitimasi Terhadap Pemerintahan Junta Militer di Myanmar	Hanifahturahmi, Ahmad Saudi, A'ang Chaarnaillan	Kualitatif deskriptif, Legitimasi Pemerintah	Kudeta tersebut bahkan menimbulkan sejumlah tanggapan positif dari masyarakat Myanmar maupun masyarakat internasional karena pemerintahan junta militer saat itu memilih kebijakan yang mengutamakan memerangi siapa saja yang menentang kekuasaannya, tanpa menghiraukan pentingnya dukungan rakyat dan pengakuan. Karena mengakibatkan berbagai kejahatan, hilangnya nyawa, dan pembatasan hak-hak sipil rakyat Myanmar, tindakan ini dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
7.	Analisis Kudeta Militer Myanmar Terhadap	Kadek Putra Yasa	Kualitatif Deskriptif, Hukum Internasional	Sejak kudeta tahun 1962 yang menjungkirbalikkan sistem demokrasi

No	Judul Penelitian	Penulis	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	Pemerintahan Sipil Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional			yang telah berlaku sejak kemerdekaan negara itu, militer telah menguasai Myanmar. Mengontrol kekuatan penuh militer seringkali menghasilkan keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat umum.
8.	Media Baru, Pemuda dan Gerakan Sosial di Mesir; Kajian terhadap Gerakan Pemuda 6 April	Fatkhur Roji, S.Hum	Kualitatif deksriptif, Teori Gerakan Sosial Baru	Gerakan Pemuda 6 April menjadi sebuah gerakan sosial baru yang berawal dari gerakan perlawanan pemuda yang turun ke jalan pada umumnya. Namun semakin berkembang menjadi suatu gerakan yang bergerak di sosial media dengan sifat multidimensional hingga mampu ikut andil meruntuhkan rezim Hosni Mubarok dengan gagasannya.
9.	Model Of The Civil Society Movement Post-Military Coup Myanmar	Raceluin Armadela Hemas Karinda1, Najamuddin Khairur Rijal	Kualitatif deskriptif, Teori Gerakan Sosial Baru	Sejarah politik Myanmar ditandai oleh perjuangan melawan kekuasaan militer dan kudeta. Kudeta 1962

No	Judul Penelitian	Penulis	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
				menggantikan demokrasi selama 26 tahun, dan penolakan hasil pemilu 1990 menjadi pemicu ketegangan. Kemenangan NLD pada 2015 dan 2020 dipatahkan oleh kudeta pada 1 Februari 2021, memicu protes massal. People's Defense Force (PDF), kelompok perlawanan bersenjata baru, muncul menghadapi tindakan keras militer. Meskipun militer menerapkan "Empat Pemotongan" untuk melemahkan perlawanan, National Unity Government (NUG) dan PDF terus memimpin perjuangan menggulingkan militer dan mengembalikan demokrasi. Studi ini mengeksplorasi dinamika Gerakan Masyarakat Sipil pasca-kudeta, fokus pada peran PDF, evolusi gerakan,

No	Judul Penelitian	Penulis	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
				pengaruh media sosial, dan tantangan bagi aktivis demokrasi di Myanmar.
10.	Arab Spring: Islam dalam gerakan sosial dan demokrasi Timur Tengah	Shafira Elnanda Yasmine	Kualitatif deksriptif, Landasan teoritik agama dan perilaku, serta Islamisme dan gerakan sosial.	Gerakan sosial dalam revolusi Arab Spring ini terkait erat dengan nilai-nilai agama, termasuk kelompok Islam yang menggabungkan kepercayaan dan ritual dalam gerakan sosial. Arab Spring menciptakan kompleksitas hubungan antara agama dan politik, dengan kelompok liberal dan sekuler menginginkan demokrasi, sementara kelompok lain menggunakan ceramah agama sebagai motivasi. Protes 'lintas batas' di seluruh negara Arab membawa solidaritas dan ribuan demonstran tewas, menciptakan perubahan yang menyebar. Artikel ini menggali peran agama dalam gerakan sosial Arab Spring

No	Judul Penelitian	Penulis	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
				dan menjawab pertanyaan tentang integrasi nilai-nilai Islam, peran Islam dalam membentuk solidaritas gerakan sosial, dan tanggapan gerakan terhadap keraguan Barat tentang kompatibilitas Islam dengan demokrasi.

1.5 Landasan Konsep

1.5.1 Konsep Gerakan Sosial Baru (New Social Movement)

Dalam penelitian ini menggunakan konsep Gerakan Sosial Baru atau *New Social Movement*, yang merujuk pada perubahan sosial yang muncul sebagai respons terhadap kondisi atau isu-isu tertentu dalam masyarakat. Istilah Gerakan Sosial Baru adalah gerakan "lunak" yang berkembang dari gerakan sosial lama sebagai akibat dari kecenderungan anggota masyarakat sipil menggunakan media sosial untuk memperdebatkan permasalahan publik namun gagal untuk benar-benar memasukkan isu tersebut ke dalam agenda publik[20].

Menyusul munculnya berbagai gerakan baru di kalangan masyarakat barat sejak pertengahan tahun 1960-an (era ekonomi pasca-industri), yang diklaim secara signifikan menyimpang dari paradigma gerakan sosial

[20] Savirani, A., *Ringkasan eksekutif hasil survei demokrasi power, welfare and and democracy. Penelitian Power, Welfare, Democracy,* diakses dari https://pwd.polgov.fisipol.ugm.ac.id/id (19/01/2024, 15.07 WIB)

tradisional sebagai dampak atau konsekuensinya, maka muncullah istilah "gerakan sosial baru" diciptakan[21]. Gerakan sosial baru ini terkonsentrasi pada keprihatinan terhadap hak asasi manusia yang mempengaruhi kualitas hidup, seperti perubahan identitas, cara hidup, dan budaya masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Gerakan sosial ini biasanya muncul dengan tujuan untuk mencapai perubahan positif dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Model Gerakan Sosial Baru tidak dibatasi oleh wacana ideologis yang menentang anti-kapitalisme, pemberontakan kelas, dan konflik kelas, berbeda dengan model Gerakan Sosial Lama. Gerakan Sosial Baru berbeda secara signifikan dari Gerakan Sosial Lama dalam taktik dan tujuan mereka, terutama dalam mempromosikan penyebab seperti pertumbuhan tenaga kerja industri, memerangi ketidaksetaraan ekonomi, dan menentang eksploitasi kelas[22].

Gerakan Sosial Baru muncul di tengah bersamaan dengan dimulainya era digital pada tahun 1960-an yang terhubung secara global. Dalam jurnalnya Sari, D.K., & Siahainenia, R. R. menyatakan bahwa siapa pun boleh bergabung dalam gerakan sosial baru, tanpa memandang kelas sosial ekonomi, afiliasi, afiliasi politik, atau latar belakang agama. Alih-alih terdaftar secara resmi sebagai "anggota" suatu organisasi, para anggota gerakan ini adalah aktor-aktor dari jaringan sosial informal yang terhubung secara longgar dan

[21] Pichardo, Nelson A., 1997, *New social movements: a Critical Re-View*, Annual Review Sociology, 23(1).
[22] Rajendra Singh. 2010. *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book. hal 122- 123

merupakan pendukung. Gerakan ini tidak memiliki organisasi formal dan hierarkis[23].

Media digital virtual yang terhubung dengan internet merupakan jenis media yang paling sering digunakan di era media baru. Tren ini memanfaatkan ruang publik yang dihasilkan secara kolektif di media sosial, yang merupakan bagian dari media digital, sebagai platform jejaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk saling mempengaruhi lintas dimensi[24]. Tidak ada pemimpin tunggal yang mencetak jejak, melainkan terdapat kekuatan kolektif dari individu-individu yang terhubung melalui jaringan global. Komunikasi dalam gerakan ini bersifat lebih horizontal, tidak lagi terpaku pada struktur hierarki. Siapa pun dapat memiliki suara dan peran yang setara dalam mengarahkan perubahan.

Perbedaan mendasar antara Gerakan Sosial Lama dan Baru terletak pada struktur kepemimpinan, dinamika komunikasi, dan keterlibatan massal. Gerakan Sosial Lama cenderung terorganisir secara lebih terpusat dan didorong oleh komunikasi top-down, sementara Gerakan Sosial Baru bersifat lebih terdesentralisasi, adaptif, dan melibatkan partisipasi masif[25].

Menurut Picardo ada beberapa ciri dari gerakan sosial baru diantaranya adalah :

a) Tujuan dan Ideologi

[23] Sari, D. K., & Siahainenia, R. R., 2015, *Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah*, 12(1)
[24] Antony, Mayfield, 2008, *What is Social Media?*, London: iCrossing.
[25] Oman Sukmana, 2016, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.

Karakteristik utama dari Gerakan Sosial Baru (GSB) terletak pada perbedaan pandangan ideologi mereka. Paradigma GSB, seperti yang dicatat menunjukkan bahwa Gerakan Sosial Baru Kontemporer mencerminkan perubahan dari gerakan era industri. Berbeda dengan fokus gerakan kelas pekerja pada distribusi ekonomi, GSB lebih menekankan perhatian pada kualitas hidup dan gaya hidup.

b) Taktik

Taktik yang digunakan oleh gerakan sosial baru mencerminkan orientasi ideologis mereka. Keyakinan dan karakter yang tidak mencerminkan demokrasi modern konsisten dengan orientasi taktik anti-institusi. GSB lebih suka tetap di luar saluran politik konvensional, memanfaatkan taktik yang mengganggu dan memobilisasi opini publik untuk mendapatkan pengaruh publik.

c) Struktur

Sikap anti-institusi dari Gerakan Sosial Baru juga mencakup cara mereka mengorganisir diri. GSB berupaya untuk mereplikasi dalam struktur mereka sendiri jenis perwakilan pemerintah yang mereka inginkan. Setiap Gerakan Sosial Baru memiliki tipe ideal organisasi yang mencerminkan gaya mereka.

d) Partisipasi

Pandangan terhadap partisipasi dalam Gerakan Sosial Baru menekankan bahwa partisipasi tidak dibatasi oleh kelas, melainkan ditandai oleh perhatian umum terhadap isu-isu sosial. Basis partisipasi

GSB didasarkan pada ideologi, bukan pada etnis, agama, atau komunitas berbasis kelas. Tujuan GSB adalah untuk mengatur hubungan antara negara, masyarakat, dan perekonomian, menciptakan ruang publik yang demokratis dengan otonomi dan kebebasan individu serta kolektivitas. Berbeda dengan gerakan klasik, struktur GSB ditentukan oleh pluralitas cita-cita, tujuan, dan orientasi, serta heterogenitas basis sosial mereka. GSB umumnya bersifat global dan tidak tersegmentasi, dioperasikan oleh aktor-aktor yang bertindak atas dasar kemanusiaan, bukan kepentingan kelas mereka[26].

Civil Disobedience Movement di Myanmar telah menjadi wujud nyata dari perlawanan gerakan sosial baru terhadap pemerintahan junta militer yang otoriter. Gerakan ini tidak hanya mencakup protes di jalan-jalan, tetapi juga melibatkan berbagai tindakan seperti boikot, pemogokan, dan penolakan untuk bekerja sama dengan rezim yang baru.

Partisipasi yang luas dari berbagai lapisan masyarakat menjadi salah satu kekuatan utama gerakan ini. Tidak hanya melibatkan aktivis politik, tetapi juga mencakup para profesional, pendidik, pelajar, pegawai negeri, dan bahkan anggota kelompok etnis minoritas. Solidaritas dan keterlibatan integratif ini memberikan tekanan yang kuat pada pemerintah militer.

Teknologi dan media sosial memainkan peran penting dalam memobilisasi massa dan menyebarkan informasi. Gerakan ini memanfaatkan kecepatan dan jangkauan media sosial untuk merencanakan protes,

[26] Ibid

mengorganisir demonstrasi, dan menarik perhatian dunia terhadap krisis di Myanmar.

Kreativitas juga menjadi elemen kunci dalam aksi gerakan ini. Aktivis menggunakan berbagai strategi inventif seperti kampanye media sosial, lagu protes, seni jalanan, dan ekspresi kreatif lainnya untuk menyampaikan pesan mereka. Inovasi ini tidak hanya menciptakan keberagaman dalam bentuk protes, tetapi juga membangkitkan semangat perlawanan di kalangan masyarakat.

Meskipun menghadapi risiko besar, termasuk penangkapan dan represi militer, para anggota gerakan ini terus memperjuangkan tujuan mereka secara damai. Bahaya dan kesulitan yang dihadapi tidak menghentikan semangat mereka untuk mencapai perubahan positif di Myanmar.

Dampak gerakan ini tidak hanya terasa di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Komunitas dunia dan berbagai negara mengecam tindakan militer di Myanmar dan menyatakan dukungan mereka terhadap perjuangan *Civil Disobedience Movement*. Dengan mendapatkan perhatian global, gerakan ini menciptakan tekanan tambahan pada rezim militer.

Tujuan jangka panjang gerakan ini mencakup perlindungan kebebasan sipil dan hak asasi manusia rakyat Myanmar. Selain itu, mereka berusaha mengakhiri kekuasaan militer dan memulihkan pemerintahan demokratis. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada perubahan politik, tetapi juga menganjurkan transformasi sosial di berbagai bidang untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, damai, dan sejahtera.

Dengan demikian, *Civil Disobedience Movement* di Myanmar menjadi contoh nyata dari Gerakan Sosial Baru yang memanfaatkan teknologi, partisipasi massa, kreativitas, dan tujuan jangka panjang untuk melawan otoritarianisme dan mendukung nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia.

1.5.2 Konsep Demokratisasi

Demokratisasi adalah langkah menuju sistem demokrasi. Menurut Potter, istilah "demokratisasi" mengacu pada perubahan politik yang bergerak menuju arah yang lebih demokratis[27]. Potter lebih lanjut menganalisis demokratisasi di suatu negara, mengidentifikasi dua jalur utama, yaitu transisi dari rezim otoriter (seperti di Amerika Latin) atau dipicu oleh tekanan eksternal (seperti di Eropa Timur).

Potter mengusulkan tiga pendekatan untuk menganalisis proses demokratisasi, yaitu pendekatan modernisasi, pendekatan transisi, dan pendekatan struktural[28]. Meskipun ia menyajikan ini sebagai alat atau tahapan komprehensif untuk memahami demokrasi, ia menekankan bahwa karakteristik pemerintahan suatu negara dapat membuat ketiga pendekatan ini tidak selalu dapat diterapkan secara universal. Sebagai contoh, Amerika Latin berhasil dalam proses demokratisasinya lebih karena faktor internal, sementara Eropa Selatan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Penulis menggunakan kerangka ini dalam konteks demokratisasi di Myanmar. Di sana, tekanan internasional memainkan peran signifikan setelah

---

[27] Anders Uhlin, 1998, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung : Mizan, hal. 10

[28] David Potter, 2000, *Democratization*, Cambridge: Open University Press. hal 3.

aksi kekerasan pemerintah junta militer, mendorong reformasi dan perubahan arah menuju demokrasi, termasuk pembentukan konstitusi baru dan pemilihan umum yang adil.

Pendekatan modernisasi menyoroti demokratisasi sebagai bagian dari proses modernisasi, dengan perkembangan sosial-ekonomi dianggap meningkatkan prospek demokrasi. Pendekatan struktural, di sisi lain, menekankan perubahan dalam kekuatan transnasional dan hubungan internasional sebagai elemen fundamental dalam penciptaan demokrasi. Potter menegaskan bahwa, pada akhirnya, analisis transisi demokrasi harus mempertimbangkan kondisi dalam negeri dan tata hubungan internasional yang mempengaruhi dinamika demokratisasi. Faktor domestik, menurut Potter, memainkan peran kunci dalam transisi demokrasi, dan tidak ada transisi yang tidak terkait dengan konflik mendasar dalam negeri[29].

Secara keseluruhan, Potter mengidentifikasi sejumlah faktor, termasuk pembangunan ekonomi, perpecahan sosial, institusi politik, budaya politik, serta keterlibatan transnasional dan internasional, yang secara bersama-sama mempengaruhi terjadinya demokratisasi dalam suatu negara[30].

Dengan demikian, konsep demokratisasi Potter dapat diterapkan pada CDM di Myanmar sebagai pendorong utama perubahan politik. Gerakan ini mencerminkan aspirasi masyarakat untuk mencapai kemajuan melalui

[29] David Potter (Eds.), Op. Cit. hal. 10.
[30] Ibid

perubahan demokratis. CDM dapat dipandang sebagai bagian dari dinamika internal dalam upaya mencapai demokratisasi di Myanmar.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Rumusan masalah yang mengarahkan penelitian untuk mengkaji atau menjelaskan konteks sosial yang akan digali secara mendalam, luas, dan mendalam dikenal dengan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan deskripsi verbal dan tertulis, teknik kualitatif berupaya memahami fenomena yang dikaji. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang "Upaya *Civil Disobedience Movement* Dalam Demokratisasi di Myanmar Pasca Kudeta Tahun 2021-2022".

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian deskriptif kualitatif kali ini secara tertulis menggunakan studi pustaka atau *literature review* sebagai strategi pengumpulan data. Tujuan dari studi pustaka dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai sumber informasi mengenai unsur-unsur yang dapat mendukung penulisan ini baik berupa artikel, jurnal, tesis, maupun tulisan lain dengan asumsi dan fakta terkini.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif merupakan kumpulan data empiris yang berupa kumpulan kata-kata bukan rangkaian angka dan tidak dapat

disusun dalam kategori atau sistem klasifikasi. Analisis kualitatif masih menggunakan kata-kata yang biasanya disusun menjadi teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistik sebagai alat analisis. Data dapat dikumpulkan dalam berbagai cara (observasi, wawancara, penguraian dokumen, rekaman kaset), dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan yang kemudian disusun secara sistematis.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Waktu

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi rentang waktu penelitian pada bulan Februari tahun 2021 hingga bulan Agustus tahun 2022. Dipilih kurun waktu tersebut dikarenakan, negara Myanmar mulai melakukan junta militernya kembali pada tahun 2021 yang disebabkan oleh hasil pemilihan umum tahun 2020 yang dimenangkan oleh Partai NLD yang diketuai oleh Aung San Suu Kyi dan hasilnya ditolak oleh pihak militer, sehingga memicu munculnya gerakan-gerakan pro demokrasi salah satunya, *Civil Disobedience Movement* di Myanmar. Serta perkembangan terbaru demokrasi di Myanmar setelah terjadinya kudeta militer pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Dikarenakan pada tahun 2022, *Civil Disobedience Movement* mulai melemah akibat banyaknya anggota yang telah ditahan dan gugur selama melakukan unjuk rasa dan krisis pasca pandemi Covid-19.

b. Batasan Materi

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan pada konsep Gerakan Sosial Baru untuk membantu dalam memahami dan menjelaskan mengenai upaya dari *Civil Disobedience Movement* dalam demokratisasi yang terjadi di Myanmar. Materi yang dibahas dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada upaya *Civil Disobedience Movement* dalam menggulingkan rezim otoriter dan transisi sistem pemerintahan yang demokrasi. Kemudian, akan menjadi unit penjelas yaitu perkembangan demokratisasi negara Myanmar.

1.7 Argumen Pokok

Argumen pokok yang membuat penulis ingin meneliti dan memperdalam mengenai fenomena ini adalah *Civil Disobedience Movement* (CDM) di Myanmar, yang muncul sebagai respons terhadap kudeta militer tahun 2021, menggambarkan sebuah narasi perubahan yang memukau. Dengan menggalang opini publik melalui aksi perlawanan non-kekerasan dan demonstrasi jalanan, CDM berhasil menciptakan gelombang kesadaran politik di masyarakat. Sementara itu, upaya-upaya tekanan ekonomi, seperti pemogokan kerja dan boikot terhadap produk militer, membawa konsekuensi ekonomi yang merongrong legitimasi rezim militer. Dengan dukungan solidaritas internasional dari pemerintah asing, organisasi non-pemerintah, dan individu di luar Myanmar, CDM menjelma sebagai kekuatan pendorong yang menjanjikan demokratisasi bagi negara tersebut pasca kudeta, membentuk narasi perjuangan yang menginspirasi yang menjanjikan bagi Myanmar pasca kudeta tahun 2021-2022.

1.8 Sistematika Penulisan

Dapat dijelaskan bahwa secara garis besar rencana penelitian ini akan terbagi dalam beberapa bab untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang utuh. Berikut istematika penulisan dalam penelitian kali ini:

BAB	JUDUL	PEMBAHASAN
I	Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Landasan Konsep 1.6 Metode Penelitian 1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan
II	Dinamika Sistem Pemerintahan dan Proses Demokratisasi di Myanmar Hingga Kudeta Tahun 2021	2.1 Dinamika Sistem Pemerintahan di Myanmar 2.1.1 Kepemimpinan Era Sao Shwe Taik 2.1.2 Kepemimpinan Era Ne Win 2.1.3 Kepemimpinan Era Saw Maung 2.1.4 Kepemimpinan Era Than Shwe 2.1.5 Kepemimpinan Era Thein Sein 2.1.6 Kemimpinan Era Htin Kyaw 2.1.7 Kemimpinan Era Win Myint 2.2 Kudeta Militer Tahun 2021 di Myanmar 2.3 Kemunculan *Civil Disobedience Movement* di Myanmar
III	Upaya *Civil Disobedience Movement* Dalam Demokratisasi Pasca Kudeta	3.1 Demonstrasi Melawan Aparat Militer Myanmar

		3.2 Kampanye yang dilakukan oleh *Civil Disobedience Movement* 3.2.1 Kampanye Secara Langsung 3.2.2 Kampanye Melalui Media Sosial 3.3 Mencari Dukungan Internasional 3.3.1 Dukungan dari ASEAN 3.3.2 Dukungan dari PBB 3.4 Kerjasama Dengan Aktor atau Organisasi Lain 3.4.1 Kerjasama dengan National Unity Government (NUG) 3.4.2 Kerjasama dengan Milk Tea Alliance 3.4.3 Kerjasama dengan Kelompok Etnis Minoritas 3.5 Sanksi yang Diterima Myanmar Pasca Kudeta Militer Tahun 2021
IV	Penutup	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran